

**Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia  
Perspektif *Value for Money* Tahun Anggaran 2012-2015**

**April Wulandari**

**Universitas Islam Indonesia**

**Email : [aprilia.soedjono@gmail.com](mailto:aprilia.soedjono@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia menggunakan metode *Value for Money* dari tahun 2012 sampai 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD atau LRA dari 34 provinsi. Kemudian untuk mengetahui perbandingan kinerja, data dihitung dengan menggunakan perhitungan *Value for Money* yang terdiri dari tiga elemen, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta dibandingkan dengan statistik diskriptif. Hasil analisis kinerja keuangan dari segi ekonomis, secara umum (nasional) disimpulkan bahwa kinerja termasuk dalam kriteria ekonomis, yaitu sebesar 89,50% dan kinerja keuangan yang paling ekonomis adalah Provinsi Riau. Sedangkan dari segi efisiensi, secara nasional kinerja keuangan dapat dikatakan kurang efisien, yaitu sebesar 98,02%, dan kinerja keuangan yang paling efisien adalah Provinsi Banten. Sementara kinerja keuangan secara efektif, secara umum dapat dikatakan efektif, yaitu sebesar 98,44%, dan kinerja keuangan yang paling efektif adalah Provinsi Papua Barat.

**Kata Kunci: Kinerja, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, *Value for Money*.**

## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD), kita selalu tertuju langsung pada otonomi daerah. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah UU nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, juga termasuk di dalamnya mengenai otonomi daerah. Secara umum yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri segala sumber daya yang dimiliki, urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengukuran kinerja suatu organisasi adalah faktor penting, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

*Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis (penghematan) berarti

pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien (berdaya guna) berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, sedangkan efektivitas (berhasil guna) berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah bahkan masyarakat tidak hanya dapat mengukur besarnya biaya barang dan jasa, tetapi dengan menggunakan *value for money* pemerintah juga dapat memperhitungkan kualitas penggunaan sumber daya, ketepatan waktu, dan kenyamanan untuk dapat menilai tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program.

### **KAJIAN PUSTAKA**

1. Menurut I Desak Made Ita Purnamasari, I Wayan Suwendra, dan Wayan Cipta (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan *Value For Money Audit* Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011”. Studi penelitian tersebut dilakukan di kabupaten Buleleng, Bali dengan hasil penelitian bahwa secara umum kinerja Dinas Pendapatan Daerah tahun 2007-2011 cukup baik karena telah memenuhi kriteria pengukuran. Akan tetapi, jika dilihat dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomis berada pada kriteria sangat ekonomis (di atas 100%) yaitu 124,85%. Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien yaitu 86,86%, (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.
2. Harry Saputra Liando, Davi Paul Elia dan Inggriani Elim (2014) tentang pengukuran kinerja pemerintah menggunakan metode *Value For Money* dengan studi kasus Pemkab Sangihe menunjukkan bahwa hasil tahun 2012 dan Realisasi Anggaran Belanja menunjukkan kenaikan, artinya realisasi belanja lebih besar dari total realisasi penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan tahun 2013 di mana realisasi anggaran

penerimaan/pendapatan dan realisasi anggaran belanja menunjukkan terjadi penurunan. Hasil analisa ekonomis berdasarkan data laporan keuangan dari jumlah realisasi belanja menunjukkan bahwa komponen belanja modal masih didominasi oleh belanja pegawai. Sedangkan dari segi efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan anggaran dan alokasi anggaran secara nominal, tahun 2012 lebih kecil dari tahun 2013, artinya bahwa pengelolaan anggaran ditahun 2012 lebih efektif dibanding dengan tahun 2013.

3. Fatmasari Sukesti dan Alfasanudin dalam jurnalnya yang berjudul “*Transparansi APBD sebagai Sarana Akuntabilitas Publik dan Good Governance*” menyebutkan bahwa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*), transparansi APBD merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program pemerintah daerah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Terlebih untuk menggambarkan kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, baik menggunakan metode *Balance Score Card*, *VFM (Value for Money)*, atau metode yang lainnya. Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tersebut, pengelolaan keuangan pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program perekonomian pemerintah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Azlim, Darwanis, dan Usman Abu Bakar yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh”, menyimpulkan bahwa pemerintah yang baik atau *Good Governance* merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas dan membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara untuk mencapai tujuan tersebut setiap pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya termasuk di dalamnya adalah keuangan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang biasa dikenal dengan APBD atau LRA juga dapat diketahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah.

5. Dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda” oleh Ayu Amrina Rosyada menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu adanya beberapa substansi yang mendukung, antara lain transparansi. Berkaitan dengan keuangan, maka harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang sesungguhnya dengan tujuan untuk menghindari adanya kebocoran dan penyelewengan penggunaan dana. Yang kedua adalah akuntabilitas. Aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan pada bidang tugasnya. Akuntabilitas erat kaitannya dengan efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Definisi Kinerja**

Menurut Mahsun dalam Hidayat (2006) yang dimaksud dengan kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi

### **2. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja (Mahsun, 2013: 26)**

- a. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
- b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
- c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi
- d. Evaluasi kinerja

### **3. Pendekatan Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik (Mahsun, 2013: 131-132)**

- a. Analisis anggaran

Perspektif pengukuran kinerja pemerintah dengan cara membandingkan anggaran yang ditetapkan dengan realisasinya. Dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu selisih lebih atau selisih kurang.

b. Analisis rasio laporan keuangan

Pengukuran kinerja organisasi pemerintah yang berdasarkan pada perspektif analisis laporan keuangan dapat berupa rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan pasar.

c. *Balance Scorecard Method (BSC)*

d. *Performace Audit (Value for Money)*

Pengukuran kinerja pemerintah dengan metode ini menekankan pada tiga substansi, yaitu ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

**4. Definisi *Value for Money***

Pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *Value for Money* merupakan pengukuran kinerja keuangan suatu organisasi, baik swasta maupun publik dengan berdasarkan tiga substansi penting, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan penghematan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan daya guna dan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

**5. Elemen-elemen *Value for Money***

a. Ekonomi

Konsep ekonomi erat kaitannya dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi adalah seluruh sumber daya *input* diperoleh dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) yaitu harga yang mendekati pasar (Afiati, 2011: 24). Pengertian ekonomi yang biasa dikenal dengan istilah tepat guna atau penghematan adalah mengelola keuangan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi pemborosan dana (pengeluaran biaya yang tidak produktif) dan kebocoran dana. Kriteria Ekonomi adalah (Mahsun, 2013: 188):

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti ekonomis
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomi berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak ekonomis.

b. Efisiensi

Efisiensi (daya guna) memiliki maksud yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* atau sumber daya yang digunakan. Jadi konsep efisiensi dalam pengelolaan suatu organisasi adalah penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya untuk mencapai hasil yang maksimal (*spending well*) (Mahsun, 2013: 182).

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

<b>Prosentase Kinerja</b>	<b>Kriteria</b>
Lebih dari 100% (> 100%)	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60% (< 60%)	Sangat Efisien

c. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi efektivitas hanya melihat apakah suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mahsun, 2013: 183). Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output*.

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

<b>Prosentase Kinerja</b>	<b>Kriteria</b>
Lebih dari 100% (> 100%)	Sangat Efektif

90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efekif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60% (< 60%)	Tidak Efektif

## 6. Manfaat Implementasi *Value for Money*

- a. Efektivitas pelayanan publik
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik
- c. Dengan menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
- d. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akunabilitas publik
- e. Alokasi biaya yang lebih berorientasi pada kepentingan publik

## 7. Konsep *Good and Clean Government*

*Asian Development Bank* (ADB) dalam sebuah seminar di Fukuoka, Jepang pada tanggal 10 Mei 1997 memberikan kesimpulan bahwa pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) merupakan faktor penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada dasarnya *good governance* pada pemerintah daerah berarti mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek politik, aspek ekonomi dan aspek administratif yang berimplikasi pada pemerataan, penurunan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan (ADB dalam Isra, 2010).

*Good Governance* memiliki makna tata pemerintahan yang baik memiliki korelasi yang erat dengan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan berwibawa serta bebas KKN dengan berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat (Bappenas, 2008 dalam Winarno dan Sari, 2012 hal: 2).

## 8. Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP (*United Nation Development Program*)

UNDP mengemukakan ada beberapa karakteristik prinsip-prinsip dari *Good Governance* yang saling terkait. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut (Departemen Agama RI 2007: 27-28):

- a. Partisipasi (*Participation*). Masyarakat diberi kesempatan dan hak yang luas dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Taat hukum (*Rule of Law*). Hukum keadilan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih harus secara merata, tidak pandang bulu.
- c. Transparansi (*Transparency*). Masyarakat berhak mengetahui segala informasi, baik keuangan, kinerja, akuntabilitas, dengan tujuan agar mudah untuk mereka pahami dan dimonitori.
- d. Responsif (*Responsiveness*). Instansi pemerintah melayani setiap *stakeholdernya* dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Aparatur pemerintah harus menghayati bahwasannya esensi dari administrasi publik adalah untuk melayani publik dengan kualitas yang baik, bukan dilayani oleh publik. Kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas, dan mengembangkannya ke dalam program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
- e. Orientasi kepada kesepakatan (*Consensus Orientation*). Menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama.
- f. Kesetaraan (*Equity*). Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan kesejahteraan.
- g. Efektif dan Efisien (*Efektiveness and Efficiency*). Proses pelaksanaan program menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang dimaksud dan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*). Mempertanggungjawabkan dan mampu menerangkan kinerja pemerintah atau pemangku kebijakan mengenai keberhasilan atau kegagalan kepada publik dan lembaga *stakeholders*.

- i. Visi Strategik (*Strategik Vision*). Pemimpin dan publik memiliki pandangan *Good Governance* yang luas dan memiliki pandangan jauh ke depan yang diperlukan untuk pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Penelitian kuantitatif di sini bertujuan untuk mengetahui besarnya prosentase kinerja pemerintah daerah provinsi dengan metode *Value for Money*. Data yang digunakan berupa data kuantitatif, adalah data-data yang berupa angka atau bilangan, seperti laporan daerah atau Laporan Realisasi Anggaran atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

### **2. Sumber Data**

Data ini dapat berupa bukti catatan yang telah tersusun dalam dokumen, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat juga bersumber dari penelusuran buku, surat kabar, jurnal, internet dan bukti catatan lain yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang dapat membantu menyelesaikan pemecahan masalah dan mendukung kebenaran dalam skripsi ini. Sangat disadari bahwa ketersediaan data tentang kinerja pemerintah provinsi di Negara Indonesia dan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *Value for Money* sangat terbatas, sehingga berbagai kajian ataupun bentuk penelitian lain yang berusaha mengeksplorasi karakteristik hal tersebut menjadi bahan rujukan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Arfan, 2014). Informasi yang diperoleh

dari metode ini adalah data mengenai laporan realisasi anggaran (APBD) tahun 2012-2015 setiap provinsi di Indonesia.

#### 4. Metode Analisis Data

Ukuran kinerja dalam hal ini menggunakan tiga elemen yang diteliti. Berikut ini penjelasan teknik analisis data yang digunakan pada masing-masing elemen (Mardiasmo dalam Afiati, 2011: 33)

Pengukuran kinerja dari segi ekonomis dapat menggunakan formula:

$$\text{Ekonomis} = (\text{Realisasi Anggaran} : \text{Anggaran Pengeluaran}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dari segi efisiensi dapat menggunakan formula:

$$\text{Efisiensi} = (\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan} : \text{Realisasi Pendapatan}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dari segi efektivitas dapat menggunakan formula

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Pendapatan} : \text{Anggaran Pendapatan}) \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi  
Tahun Anggaran 2012-2015

No.	Nama Provinsi	Rata-rata Rasio		
		Ekonomis	Efisiensi	Efektivitas
1	Aceh	93,10 (ekonomis)	100,98 (inefisien)	99,20 (efektif)

2	Sumatera Utara	86,54 (ekonomis)	104,64 inefisien)	88,19 (cukup efektif)
3	Sumatera Barat	93,31 (ekonomis)	97,61 (kurang efisien)	101,26 (sangat efektif)
4	Riau	73,88 (ekonomis)	96,55 (kurang efisien)	101,78 sangat efektif)
5	Jambi	90,96 (ekonomis)	102,20 (inefisien)	107,70 sangat efektif)
6	Sumatera Selatan	90,32 (ekonomis)	92,08 (kurang efisien)	94,62 (efektif)
7	Bengkulu	92,44 (ekonomis)	99,61 (kurang efisien)	101,00 (sangat efektif)
8	Lampung	85,73 (ekonomis)	93,34 (kurang efisien)	90,44 (efektif)
9	Kep. Bg Belitung	86,22 (ekonomis)	98,96 (kurang efisien)	99,54 (efektif)
10	Kepulauan Riau	90,94 (ekonomis)	95,22 (kurang efisien)	99,35 (efektif)
11	DKI Jakarta	74,25 (ekonomis)	92,36 (kurang efisien)	86,97 (cukup efektif)
12	Jawa Barat	89,65 (ekonomis)	97,65 (kurang efisien)	106,81 (sangat efektif)
13	Jawa Tengah	93,45 (ekonomis)	99,70 (kurang efisien)	101,30 (sangat efektif)

14	DIY	80,34 (ekonomis)	90,70 (kurang efisien)	95,10 (efektif)
15	Jawa Timur	95,48 (ekonomis)	97,84 (kurang efisien)	104,15 (sangat efektif)
16	Banten	85,70 (ekonomis)	88,80 (cukup efisien)	100,17 sangat efektif)
17	Bali	87,61 (ekonomis)	97,73 (kurang efisien)	106,41 (sangat efektif)
18	NTB	91,90 (ekonomis)	97,20 (kurang efisien)	94,60 (efektif)
19	NTT	93,75 (ekonomis)	98,30 (kurang efisien)	91,53 (efektif)
20	Kalimantan Barat	94,40 (ekonomis)	97,40 (kurang efisien)	101,30 (sangat efektif)
21	Kalimantan Tengah	91,10 (ekonomis)	97,90 (kurang efisien)	101,20 (sangat efektif)
22	Kalimantan Selatan	90,54 (ekonomis)	104,625 (kurang efisien)	99,56 (efektif)
23	Kalimantan Timur	90,81 (ekonomis)	90,60 (kurang efisien)	94,48 (efektif)
24	Kalimantan Utara	100,74 (inekonomis)	112,74 (inefisien)	96,08 (efektif)
25	Sulawesi Utara	88,85 (ekonomis)	95,89 (kurang efisien)	100,65 (sangat efektif)

26	Sulawesi Tengah	86,10 (ekonomis)	98,76 (kurang efisien)	92,12 (efektif)
27	Sulawesi Selatan	92,62 (ekonomis)	101,26 (inefisien)	96,40 (efektif)
28	Sulawesi Tenggara	84,51 (ekonomis)	94,50 (kurang efisien)	100,80 (sangat efektif)
29	Gorontalo	92,30 (ekonomis)	100,97 (inefsien)	97,87 (efektif)
30	Sulawesi Barat	90,50 (ekonomis)	92,46 (kurang efisien)	99,88 (efektif)
31	Maluku	89,36 (ekonomis)	102,53 (inefisien)	95,42 (efektif)
32	Maluku Utara	89,34 (ekonomis)	105,41 (inefisien)	92,69 (efektif)
33	Papua	93,13 (ekonomis)	98,10 (kurang efisien)	99,83 (efektif)
34	Papua Barat	93,08 (ekonomis)	98,13 (kurang efisien)	108,48 (sangat efektif)
	<b>Nilai Terendah</b>	<b>73,88</b> (ekonomis)	<b>88,80</b> (cukup efisien)	<b>86,97</b> (cukup efektif)
	<b>Nilai Tertinggi</b>	<b>100,74</b>	<b>112,74</b>	<b>108,48</b>
	<b>Modus</b>	-	-	<b>101,30</b>
	<b>Median</b>	<b>90,68</b>	<b>97,87</b>	<b>99,55</b>
	<b>Standar Deviasi</b>	<b>5,41</b>	<b>4,84</b>	<b>5,28</b>

<b>Rata-rata Nasional</b>	<b>89,50</b>	<b>98,02</b>	<b>98,44</b>
---------------------------	--------------	--------------	--------------

**a. Rasio Ekonomis**

Hasil perhitungan pada rasio ekonomis kinerja keuangan pemerintah provinsi seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan telah dapat dikatakan ekonomis dengan rata-rata nasional sebesar 89,50%. Jarak atau selisih rasio ekonomis setiap provinsi dengan rata-rata nasional sebesar 5,41. Nilai tersebut lebih tinggi dari rasio yang lainnya. Artinya, ketimpangan kinerja ekonomis lebih tinggi. Hasil perhitungan ini sejalan dengan teori Halim (2002) yang menyatakan biaya terendah yang mencakup pengelolaan secara berhati-hati serta cermat dan tidak ada pemborosan dalam pengelolaan sumber daya maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara ekonomi, artinya semakin besar anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi biaya yang dikeluarkan maka rasio ekonominya semakin tinggi (Purnamasari, 2014).

Hanya terdapat satu provinsi yang kinerja keuangannya tidak ekonomis, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Tingginya rasio ekonomis Provinsi Kalimantan Utara disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan, yaitu kualitas belanja yang kurang baik (proporsi belanja pegawai sangat besar). Proporsi belanja pegawai relatif cukup besar, dengan prosentase pada kisaran 30%. Kemudian, penyaluran dana perimbangan yang tidak sesuai dan lambat dan penyerapan belanja modal yang sedikit dan lambat.

Sementara kinerja keuangan yang paling ekonomis diantara 34 provinsi adalah Provinsi Riau dengan rasio ekonomis 73,88%. Beberapa upaya atau kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk melakukan penghematan dana, misalnya dengan penghematan belanja operasi, memotong dana perjalanan dinas para pegawai dan mengoptimalkan belanja modal yang secara umum memberikan *multiplier effect*, seperti belanja jalan, irigasi dan jaringan.

## **b. Rasio Efisiensi**

Berdasarkan pada hasil perhitungan pada rasio efisiensi kinerja keuangan yang paling efisien adalah Provinsi Banten dengan rasio efisiensi sebesar 88,80%. Potensi pemerintah dalam menghasilkan PAD sangat optimal, yaitu dibuktikan dengan realisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan total yang selalu mendominasi dan selalu mengalami peningkatan Lebih dari 50% pendapatan daerah ditopang oleh PAD. Namun di tahun 2015, kinerja keuangan mengalami inefisiensi 9,63%, dan mencapai 109,63%. Inefisiensi tersebut disebabkan oleh adanya rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang sebesar 67,8% menurun dari tahun 2014 sebesar 69,31%. Selanjutnya, perolehan pajak dan retribusi yang tidak melampaui target, antara lain Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 817.308.241.621,00 atau 9,03% dari target APBD, realisasi pajak pendapatan rokok yang terealisasi sebesar Rp 470.658.861.039,00 atau 79,77%. Kemudian, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp 527.085.000,00 atau 9,88%.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah Provinsi Banten adalah memberikan insentif untuk merangsang agar kegiatan ekonomis masyarakat meningkat seperti, penyederhanan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan layanan, serta peningkatan belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, belanja gedung, tanah yang dapat mendorong investasi.

Sama halnya dengan pengukuran ekonomis. Efisiensi kinerja yang paling rendah adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2014 sampai tahun 2015 efisiensi kinerja mengalami penurunan hingga menyebabkan inefisiensi kinerja dan defisit anggaran masing-masing sebesar Rp 419.012.425.933,52 dan Rp 1.484.820.917.516,46. Secara umum dari

tahun 2012 sampai 2015 realisasi pendapatan selalu lebih kecil dari biaya yang digunakan.

Ditinjau secara nasional, diketahui bahwa rata-rata rasio efisiensi kinerja keuangan seluruh provinsi adalah kurang efisien dengan rasio efisiensi sebesar 98,02%. Hanya terdapat satu provinsi yang kinerja keuangannya dikatakan cukup efisien, yaitu Provinsi Banten. Terdapat 9 provinsi atau 26,5% yang efisiensi kinerja keuangannya masuk dalam kriteria tidak efisien, dan 70,56% atau 24 provinsi, kinerja keuangannya kurang efisien. Berdasarkan standar deviasi yang senilai 4,84, terlihat bahwa ketimpangan efisiensi kinerja antar provinsi tidak terlalu tinggi. Kurangnya efisiensi kinerja dapat disebabkan oleh pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar dan adanya ketidakserasian antara belanja operasional dengan belanja modal.

Perhitungan efisiensi kinerja tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk. (2014), yaitu kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng cukup efisien dengan rasio efisiensi sebesar 86,86%. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan yang terus mengalami peningkatan sehingga melampaui realisasi belanja. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teorinya Mahsun (2013), yang menyebutkan bahwa konsep efisiensi dalam pengelolaan suatu organisasi adalah penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya untuk mencapai hasil yang maksimal atau dikenal dengan istilah *spending well*.

### **c. Rasio Efektivitas**

Menurut hasil perhitungan pada rasio efektivitas, secara nasional kinerja keuangan pemerintah provinsi termasuk dalam kriteria efektif, karena rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 98,44%. Terdapat 14 provinsi atau 41,2% yang kinerja keuangannya termasuk dalam kriteria sangat efektif, 18 provinsi atau 52,9% masuk dalam kriteria efektif dan 2 provinsi atau 5,9% yang kinerja keuangannya cukup efektif. Ketimpangan efektivitas kinerja

keuangan antar provinsi lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan efisiensi kinerja keuangan, yang ditunjukkan dengan nilai standar deviasi, yaitu sebesar 5,28.

Provinsi yang efektivitas kerjanya paling baik adalah Provinsi Papua Barat dengan rasio efektivitas mencapai 108,48%. Hanya tahun 2015 yang masih tergolong efektif, karena realisasi pendapatan di bawah 100%. Tahun 2012 sampai tahun 2014 efektivitas kinerja sangat efektif dan rata-rata rasio efektif 111,91%. Pemerintah daerah Papua Barat harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya, terutama dari sektor pariwisata. Inisiatif, kreatifitas dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Dari berkembangnya sektor pariwisata yang dimiliki Papua Barat akan menumbuhkan pula potensi-potensi PAD yang lain seperti, BUMD, restoran, penginapan, dan lahan investasi lainnya.

Pengukuran efektivitas kinerja keuangan yang paling rendah adalah Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata rasio efektivitas 86,97%. Memang dalam anggaran dan realisasi secara nominal meningkat, namun prosentase realisasi terhadap APBD tidak demikian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program-program pemerintah tidak dapat direalisasikan secara penuh. Tingginya realisasi pendapatan secara nominal didukung oleh banyaknya lapangan pekerjaan di provinsi tersebut, dan juga merupakan pusat kegiatan industri, serta merupakan pusat pemerintahan.

Hasil perhitungan ini, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Harry Saputra Liando, dkk. (2014) tentang pengukuran kinerja pemerintah menggunakan metode *Value for Money* di Pemerintah Kabupaten Sangihe. Dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Sangihe sebesar 93,89% di tahun 2012 dan 92,78% di tahun 2013, dan telah memenuhi standar efektivitas. Di samping itu, hasil perhitungan ini juga didukung oleh Rosyada (2016) yang mengutarakan bahwa rasio efektivitas kinerja keuangan yang semakin besar menggambarkan tingkat pencapaian suatu pelayanan publik yang berdasarkan pada sasaran awal.

## Klasifikasi Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Setiap Pulau

**Tabel 4.2**  
Perbandingan Rata-rata Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi  
Berdasarkan Pulau (Persen)  
Tahun Anggaran 2012-2015

No.	Pulau	Ekonomis	Efisiensi	Efektivitas
1	Jawa	86,48	94,51	99,08
2	Sumatera	88,34	98,12	98,31
3	Nusa Tenggara	91,09	97,74	97,51
4	Sulawesi	89,15	97,31	97,95
5	Kalimantan	93,52	100,65	98,52
6	Kepulauan Maluku	89,35	103,97	94,06
7	Papua	93,105	98,12	104,16
	<b>Modus</b>	-	-	-
	<b>Median</b>	<b>89,35</b>	<b>98,12</b>	<b>98,32</b>
	<b>Nilai Tereдах</b>	<b>86,48</b>	<b>94,51</b>	<b>94,06</b>
	<b>Nilai Tertinggi</b>	<b>93,52</b>	<b>103,97</b>	<b>104,16</b>
	<b>Standar Deviasi</b>	<b>2,56</b>	<b>2,96</b>	<b>2,98</b>

Secara keseluruhan, pengukuran kinerja keuangan perspektif *Value for Money* telah dapat dikatakan merata pada setiap pulau. Standar deviasi masing-masing elemen hampir sama dan berkisar pada angka 3. Kinerja keuangan yang paling ekonomis berada pada pulau Jawa.

Sama halnya dengan pengukuran ekonomis. Kinerja yang paling efisien juga berada pada pulau Jawa. Telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan banyak para urban di pulau Jawa. Tidak heran jika pembangunan infrastruktur lebih diprioritaskan dan banyak investor yang menanamkan modal di pulau Jawa, baik dalam bidang pariwisata, hiburan, teknologi dan informasi bahkan bidang kesehatan dan pendidikan. Hal tersebutlah

yang merupakan lumbung PAD bagi pemerintah daerah di pulau Jawa. Meskipun realiasi belanja tinggi, namun realisasi total pendapatan masih melampaui jumlah belanja.

Sementara pada perhitungan rasio efektivitas, kinerja keuangan yang paling efektif adalah pulau Papua, yang terdiri dari pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat. Perolehan PAD di pulau Papua, pada umumnya merupakan kontribusi dari pajak dan retribusi daerah, juga dari sektor pariwisata. Namun pada dua provinsi tersebut, perolehan pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mengindikasikan bahwa pemerintah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.

Hasil perhitungan di atas selaras dengan teori *Good and Clean Governance*. Pinsip dari teori tersebut adalah kegiatan dalam suatu instansi pemerintahan yang dilakukan dengan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, transparansi, partisipasi, aturan hukum daya tangkap dan akuntabilitas (Rosyada, 2016).

Pengukuran ekonomis pada kinerja keuangan pemerintah juga merupakan bagian dari proses mewujudkan pemerintahan yang bersih, karena pengukuran ekonomis menggambarkan kehematan dalam mengelola biaya, yang nantinya akan dapat diketahui ada tidaknya kebocoran dana. Pengukuran efisiensi kinerja juga salah satu bagian dari penerapan pemerintahan yang baik dan bersih, karena salah satu karakteristik dari *Good Governance* menurut UNDP adalah efisien dan efektif, yang artinya proses pelaksanaan program menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang dimaksud, dan dengan menggunakan sumber-sumber daya sebaik mungkin. Kemudian, pengukuran efektivitas kinerja juga menggambarkan dari perwujudan *Good Governance*, yang mana efektivitas kinerja mencerminkan sejauh mana program-program pemerintah untuk kepentingan publik tercapai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya rasio ekonomis kinerja keuangan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:
  - a. Regulasi atau kebijakan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan kualitas SDM. Dikeluarkannya berbagai peraturan mengenai pengeluaran pemerintah daerah, dimaksudkan agar aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu pemerataan dan keadilan, akuntabilitas, tidak adanya penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya, serta sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.
  - b. Komunikasi kelembagaan. Terciptanya komunikasi yang benar antara pimpinan dengan bawahan (dalam hal ini SKPD) akan berimplikasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
  - c. Struktur belanja daerah yang lebih banyak pada pos belanja operasional dibandingkan belanja modal. Tidak sedikit contoh pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai program-program kerja yang dinilai tidak produktif, seperti intensitas perjalanan dinas yang terlalu sering, kunjungan kerja dan makan minum para aparatur pemerintah DIY di DPRD serta pembangunan gedung Dinas Pendidikan dan Olahraga.
  - d. Semakin jauh jarak suatu daerah atau pulau dengan letak pemerintah pusat dan pusat perindustrian. Pada realitasnya, pembangunan infrastruktur (belanja modal) lebih ditekankan pada daerah atau pulau yang merupakan pusat pemerintahan serta pusat industri. Sehingga akan lebih banyak tenaga kerja yang lebih tertarik berdomisili di pulau tersebut dan para investor untuk menanamkan modalnya. Sementara, daerah atau pulau yang jauh dari pusat pemerintahan dan kondisi lingkungan yang masih didominasi alam, pemerintah daerah kurang optimal dalam pembiayaan belanja modal.
2. Hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi belanja modal. Belanja modal merupakan belanja daerah yang memiliki nilai produktivitas bagi perekonomian daerah dan juga memberikan *multiplier effect*. Belanja modal akan mendorong pembukaan dan perluasan usaha oleh investor di daerah tersebut dan mempermudah akses perekonomian daerah, seperti pembangunan jalan, jaringan dan irigasi.
  - b. Optimalisasi perusahaan daerah dan UMKM. Laba yang diperoleh dari BUMD secara langsung akan menjadi lumbung bagi PAD. Sementara UMKM akan menciptakan ekonomi kreatif dan inovasi yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
  - c. Prosedur pelayanan publik atau aturan main yang sederhana, terutama pada pelayanan pajak yang pada umumnya menjadi kontributor terbesar dalam PAD. Memungkinkan masyarakat akan taat untuk membayar pajak dan retribusi.
  - d. Daerah atau pulau yang terpisah jauh dari pusat pemerintahan dan perindustrian. Telah disebutkan bahwa infrastruktur lebih diprioritaskan di pulau yang merupakan pusat dari pemerintahan dan banyak kawasan perindustrian, seperti pulau Jawa. Dalam suatu pulau, kota yang menjadi pusat industri ataupun pusat perekonomian yang lainnya akan memberikan dampak bagi daerah yang berada di sekitarnya.
3. Hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:
- a. Kebijakan pemerintah. Misalnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan PAD yaitu insentif untuk merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat meningkat, seperti: penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak.
  - b. Sistem pengendalian intern pemerintah. Baik buruknya sistem pengendalian terhadap kinerja pemerintah atau kelembagaan juga berpengaruh pada perolehan PAD. Hal ini erat kaitannya dengan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan layanan.
  - c. Jumlah BUMD di setiap provinsi atau secara umum pada setiap pulau.

- d. Kondisi lingkungan dan potensi yang dimiliki setiap daerah atau pulau. Misalnya, provinsi DIY yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Kemudian, pulau Papua dan Kepulauan Maluku yang juga memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang sangat melimpah, memungkinkan dilakukan ekspor.
- e. Besarnya prosentase dana perimbangan yang diterima dari pusat terhadap total pendapatan daerah.

## **SARAN**

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki oleh setiap provinsi sangat melimpah dan berdampak besar bagi masyarakatnya. Apabila pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak dan retribusi yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan PAD juga akan meningkat. Selain dari pada itu, peningkatan dalam mengelola potensi daerah juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau kemandirian fiskal akan meningkat, mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Dari pihak aparatur pemerintah daerah, harus memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, terutama dalam pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. termasuk pengeluaran dana dalam mendukung perolehan PAD.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk

menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 4 tahun. Kemudian dari hasil perkitungan yang telah ditemukan, sebaiknya lebih dikembangkan dan divariasikan lagi, seperti analisis faktor yang mempengaruhi, melakukan perbandingan yang didasarkan pada pandangan islam beserta tolok ukur yang digunakan dalam islam, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Tri Astuti. (2011). “ Analisis Value for Money pada Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang. Tugas Akhir Ahli Madya. Diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/8064/1/10557.pdf>
- Aini, Wildan Nikmatul. (2016). “Implementasi Manajemen Strategi pada Usaha Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda Trenggalek”. Skripsi Sarjana. Diakses dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4708/1/COVER.pdf>
- Al-Maqassary, Ardi. (2013). “Langkah-langkah Meningkatkan Kinerja”. Diakses dari <http://www.e-jurnal.com/2013/10/langkahlangkah-meningkatkan-kinerja.html>
- Ardila, Isna dan Ayu Anindya Putri. (2015). “Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan *Valur for Money* pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi”. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Volume 15 Nomor I. Diakses dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/428/pdf/60>
- Arfan, Demi Aulia. (2014). “ Analisis *Value for Money* dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012”. Skripsi Sarjana. Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/15286/1/skripsi.pdf>
- Azlim, dkk. (2012). “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi SKPD di Kota Banda Aceh”. Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor I. Diakses dari <http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmia/images/Jurnal/vol.1.ma/1.1.ma/1.1.14.azlim.pdf>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2016). “KEKR PrOVINSI Sumatera Barat Triwulan IV”. Diakses dari <http://www.sumbarprov.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Bengkulu” Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Lampung” Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2016). “KEKR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Jawa Barat Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. “KEKR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. “KEKR Provinsi Bali”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. “KEKR Provinsi NTT”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Badan Keuangan Daerah. (2015). “Transparansi Keuangan”. Diakses dari <http://www.bakuda.kalselprov.go.id/>

Bank Indonesia. (2016). “KEKR Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV 2014”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2016). “KEKR Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2014). “KEKR Provinsi Gorontalo Triwulan IV 2013”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2016). “KEKR Provinsi Gorontalo Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. “Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Sulawesi Barat”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2012). “Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2013). “Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2014). “Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

- Bank Indonesia. (2015). “Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2012). “Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2013). “Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2014). “Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2015). “Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>
- Bappeda. (2015). “ Analisis APBD”. Diakses dari <http://bappeda.kaltaraprov.go.id/>
- BPKA. (2017). “Laporan Realisasi Anggaran”. Diakses dari <http://bpka.acehprov.go.id/>
- BKAD. “Laporan Realisasi Anggaran”. Diakses dari <http://bpkad.sumselprov.go.id/>
- BPKAD. (2015). ”Laporan Realisasi Anggaran”. Diakses dari [http://e-keuangan.riau.go.id/BPKAD\\_RIAU/](http://e-keuangan.riau.go.id/BPKAD_RIAU/)
- BPKAD. (2015). Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta”. Diakses dari <http://www.bpkad.jakarta.go.id/>
- BPKAD. (2015). Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah DIY”. Diakses dari <http://dpkad.jogjaprov.go.id/>
- BPKBMD. (2015). “LRA Prov. Sulut”. Diakses dari <http://www.bpkbmd.sulutprov.go.id/>
- BPS. (2015). “ Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat”. Diakses dari <http://www.irjabar.bps.go.id/>
- BPKP. (2017). “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/1858/LAKIP-PEMERINTAH-DAERAH>
- BPS. (2014). “ Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat”. Diakses dari <http://www.irjabar.bps.go.id/>
- Departemen Agama RI. (2007). “Akuntabilitas dan *Good Governance*”. Jakarta: Sekjen Biro Organisasi dan Tata Laksana Depag RI.
- Dispenda. (2016). “Pendapatan Papan Tahun 2011-2015”. Diakses dari <http://www.dispendapapua.com/>
- Ferina, Ika Sasti dan Fika Arista. (2013). “Penilaian Kinerja dengan Menerapkan Indikator *Value for Money* pada Kantor Pertahanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2011”. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Volume 11 Nomor 21. Diakses dari <https://www.google.com/search?q=ika+sasti+ferina%2C+penilaian+ki>

nerja+dengan+menerapkan+indikator+value+for+money+pada+kantor+pertanahan+kecamatan+musi+banyuasin+tahun+2009-2-11&ie=utf-8&oe=utf-8

- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Isra, Saldi. (2010). “Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih di Daerah”. Diakses dari <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/254-menciptakan-pemerintah-yang-baik-dan-bersih-di-daerah.html>
- Kabupaten Purworejo. (2014). “LKjIP Kabupatn Purworejo Tahun 2014”. Diakses dari [www.purworejokab.go.id/downloads/sambutan-bupati/doc\\_download/82-lkqip-2014](http://www.purworejokab.go.id/downloads/sambutan-bupati/doc_download/82-lkqip-2014)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2015). “Rapor Akuntabilitas Kinerja K/L dan Provinsi Meningkatkan”. Diakses dari <https://www.menpan.go.id/berita-terkini/4170-rapor-akuntabilitas-kinerja-k-l-dan-provinsi-meningkat>
- Liando, Harry Saputra, dkk. (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value for Money*”. Jurnal EMBA. Volume 2 Nomor 3.
- Mahsun, Mohammad. (2013). “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Nugrahayu, Ributani Erika. (2015). “Penerapan Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja Perusahaan”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 4 nomor 10. Diakses dari <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/1099/1057>
- Pemprov Gorontalo. (2012). “TPKD”. Diakses dari <http://www.gorontaloprov.go.id/>
- Pemprov Sumut. (2017). “Laporan Realisasi Anggaran”. Diakses dari <http://www.sumutprov.go.id/>
- Pemprov Gorontalo. (2015). “CALK Provinsi Gorontalo 2014”. Diakses dari <http://www.gorontaloprov.go.id/>
- Pemprov Kepulauan Riau. “LKPD yang Sudah Diaudit”. Diakses dari <http://www.kepriprov.go.id/>
- Pemprov Sulawesi Tengah. (2015). “Laporan Realisasi Anggaran Sulawesi Tengah Tahun 2013 dan 2014”. Diakses dari <http://www.sultengprov.go.od/>
- Pemprov Jatim. (2016). “LKPD Provinsi Jawa Timur”. Diakses dari <http://transparansi.jatimprov.go.id/>

- Pemprov Kalbar. (2016). “LRA”. Diakses dari <http://www.kalbarprov.go.id/>
- Pemprov Kalteng (2016). “Realisasi APBD”. Diakses dari <http://www.kaltengprov.go.id/>
- Pemprov Jabar. (2017). “Ringkasan Laporan Realisasi APBD”. Diakses dari <http://www.jabarprov.go.id/>
- Pemprov Lampung. (2015). “Laporan Realisasi Anggaran”. Diakses dari <http://www.lampungprov.go.id/>
- Pemerintah provinsi Jambi. (2016). “Laporan Realisasi APBD”. <http://jambiprov.go.id/images/keuangan/6492LRAPBD.pdf>
- PPID Banten. (2015). “Laporan Keuangan”. Diakses dari <http://www.bantenprov.go.id/>
- PPID. “Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Jawa Tengah”. Diakses dari <http://ppid.jatengprov.go.id/>
- PPID NTB. (2015). “Laporan Keuangan Provinsi NTB”. Diakses dari <http://ppid.ntbprov.go.id/>
- Punamasari, I Desak Made Ia, dkk. (2014). “Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan *Value For Money Audit* Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011”. E—journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Volume 2. Diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Qg5I3WIYE XkJ:ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjm/article/download/2105/1838+&cd=1&hl=id&ct=clnk>
- Putra, Yosi Pratama. (2012). “*Value for Money*”. Diakses dari <http://yosipratamaputra.blogspot.co.id/2012/04/value-for-money.html>
- Rosyada, Ayu Amrina. (2016). “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. E-journal Ilmu Pemerintahan 4 (1). Diakses dari <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/01/JURNAL%20Ayu%20%2801-20-16-09-36-29%29.pdf>
- Sari, Kususma DA. dan WA. Winarno. (2012). “Implementasi *E-Governmen System* dalam Upaay Peningkatan *Clean and Good Governance* di Indonesia”. JEAM Volume XI Nomor 1. Diakses dari
- Sugiyono. (2012). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif fan R&D”. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2016). “Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabea.
- Sukesti, Fatmasari, dan Alfasanudin. “Transparansi APBD sebagai Sarana Akuntabilitas Publik dan *Good Governance*”. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=161539&val=423&title=TRANSPARANSI%20APBD%20SEBAGAI%20SARANA%20AKUNTABILITAS%20PUBLIK%20DAN%20GOOD%20GOVERNANCE>
- Sunyoto, Danang. (2013). “ Metodologi Penelitian Akuntansi”. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tuliat. (2017). “Jumlah Provinsi di Indonesia”. diakses dari <http://www.tuliat.com/jumlah-provinsi-di-indonesia/>
- Yahya, Idhar. (2006). “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah”. Jurnal Sistem Teknik Industri. Volume 7 Nomor 4. Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21134/sti-0kt2006-7%20%285%29.pdf;jsessionid=06EB9A341019904965C56CC928114974?sequence=1>
- Yarni, Meri dan Latifah Amir. (2014). “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum.